

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kapabilitas merupakan kapasitas sebuah organisasi untuk mengerahkan sumber daya, menggunakan proses organisasi untuk mempengaruhi tujuan yang diinginkan. Kapabilitas adalah atribut dari sebuah organisasi yang memungkinkannya untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada dalam penerapan strategi. Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam Program *Sister Village* merupakan penilaian utama dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai pemangku kepentingan utama dalam penanganan bencana. Berdasarkan hasil penelitian kapabilitas Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam Program *Sister Village* adalah sebagai berikut :

a. Kapabilitas Kelembagaan

Kapabilitas Kelembagaan dari Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam program *Sister Village* sebagai upaya mitigasi bencana di Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari sudah ada struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi yang jelas dan disertai dengan kemampuan menjalin *networking* di semua level pemerintah hingga swasta. Hal tersebut dilihat dari adanya struktur organisasi yang jelas dari *Sister Village*, tugas pokok dan fungsi yang sudah rinci serta kemampuan menjalin hubungan antar desa dan level pemerintah.

b. Kapabilitas Sumber Daya Manusia

Kapabilitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam program *Sister Village* dan disertai dengan pembagian pekerjaan dan pendelegasian tugas yang jelas dalam program *Sister Village*. Pembagian tugas dan pekerjaan dalam *Sister Village* didasarkan pada kompetensi masing-masing individu.

c. Kapabilitas Kebijakan

Kebijakan-kebijakan yang ada menjadi acuan dalam pelaksanaan program penanggulangan kebencanaan termasuk salah satunya program *Sister Village* di Kabupaten Boyolali. Kebijakan yang ada membuktikan bahwa indikator tersedianya undang-undang, kebijakan dan peraturan sebagai landasan pengambilan keputusan dari Pemerintah Kabupaten Boyolali sudah terpenuhi dalam Program *Sister Village*. Namun, indikator menjalin hubungan dengan institusi lainnya serta untuk memobilisasi sumber daya masih belum ada.

d. Kapabilitas Keuangan

Kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam Program *Sister Village* sebagai upaya mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari tersedianya anggaran untuk kebencanaan. Namun, anggaran khusus untuk program *Sister Village* belum digulirkan secara nyata. Hal tersebut

dibuktikan pada saat ini anggaran utama dari program *Sister Village* adalah dana sumbangan dari lembaga swasta.

e. Kapabilitas Teknis

Kapabilitas Teknis Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam program *Sister Village* sebagai upaya mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi dapat dilihat dengan sudah sistem teknis yang tersusun, manajemen logistik yang ada tetapi masih belum sesuai dengan kebutuhan, sistem teknologi informasi yang masih sederhana dalam peringatan dini *Sister Village* dan dapat memberikan berbagai informasi yang berkaitan dengan kedaruratan bencana. dan dapat memberikan berbagai informasi yang berkaitan dengan kedaruratan bencana meskipun belum terlalu maju.

f. Kapabilitas Kepemimpinan

Tingkat Kapabilitas kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam *Sister Village* dapat dilihat dari fungsi koordinasi dan arahan dalam bentuk komando yang sudah dijalankan oleh Kepala Desa di Desa *Sister Village*. Kapabilitas kepemimpinan BPBD Kabupaten Boyolali juga dapat dilihat dari pengambilan keputusan yang tepat untuk membentuk unit yang bekerja sama dengan elemen pemerintahan lainnya.

4.2 Saran

4.2.1 Saran untuk memperbaiki Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam Program *Sister Village* sebagai Upaya Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi

1. Keterbatasan anggaran merupakan salah satu permasalahan besar dalam keberjalanan Program *Sister Village*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam Program *Sister Village* masih kurang. Perlu adanya anggaran yang diberikan dari pemerintah untuk menunjang Program *Sister Village* di lingkungan Kabupaten Boyolali agar berjalan dengan baik.
2. Sistem logistik yang ada masih kurang sesuai kebutuhan masyarakat yang terdampak langsung dengan bencana Gunung Merapi. Perlu adanya perbaikan sistem logistik agar bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan dapat meringankan masyarakat Kabupaten Boyolali yang terdampak erupsi Gunung Merapi.
3. Sistem informasi dari BPBD yang sudah ada dapat dikembangkan lagi agar lebih maju dan masyarakat dapat menggunakannya dengan lebih mudah dan dapat diakses oleh seluruh Masyarakat yang terdampak bencana.